

## OPTIMALISASI REHABILITASI RUANG KELAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Meilina Bustari

(Universitas Negeri Yogyakarta)

### Abstrak

Ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/pembangunan ruang kelas harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan baik dalam bentuk gambar bestek maupun spesifikasi teknisnya. Adapun standar rehabilitasi ruang kelas adalah ukuran ruangan menyesuaikan dengan ukuran ruang kelas yang akan direhabilitasi; tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai; dan kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah. Mulai tahun anggaran 2011 pemerintah telah berupaya untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas dan ruang belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta sehingga diharapkan pada tahun 2013 sudah tidak ada lagi ruang kelas dan ruang belajar SD dan SMP rusak berat. Sistem rehabilitasi yang ada saat ini jumlah ruang kelas yang masih mengalami rusak berat yang berdasarkan data awal tahun 2011 sebanyak 153.026 ruang, yaitu 110.598 Sekolah Dasar dan 42.428 Sekolah Menengah Pertama dan sebagian pada tahun ini juga sudah dilaksanakan rehabilitasi. Dengan tetap memberdayakan sistem yang sudah ada pada tahun 2012 rehabilitasi sisanya yang sebanyak 131.526 ruang terdiri dari 92.598 Sekolah Dasar dan 38.928 Sekolah Menengah Pertama akan dilaksanakan melalui APBN.

*Kata kunci : rehabilitasi ruang kelas, wajar pendidikan dasar 9 tahun*

## OPTIMIZING CLASSROOM REHABILITATION IN SUPPORTING 9 YEARS COMPULSORY EDUCATION IMPLEMENTATION

### Abstract

*Classrooms are common facilities which are used for learning activities. Therefore, the building must meet the comfort and strength standard required in the Regulation of the Minister of National Education No. 24 of 2007 on Standard of Facilities and Infrastructure for SD/MI, SMP/MTs and SMA/MA. In order to fulfill the comfort and safety standard as regulated in Permendiknas, then in the process of rehabilitation/classroom development must meet the standard and specification specified in the auction document in the form of bestek picture and its technical*

*specification. The classroom rehabilitation standard is the size of the room to adjust to the classroom size to be rehabilitated; the high of room ceiling at least 3.50 meters from the floor; and the roof slope adjusts to the type of roof cover which is used. One of the government's efforts in improving the quality of primary education services is to improve the quality of school facilities and its learning facilities. Starting from the 2011 budget year, the government has made efforts to rehabilitate the classrooms and study room in elementary school (SD and SMP), both public and private, so it is expected that by 2013, there will be no more damaged classroom and study room for elementary and junior high schools. The current rehabilitation system shows that schools are still experiencing serious damage to classrooms based on preliminary data for 2011, there are 153,026 rooms, namely 110,598 elementary schools and 42,428 secondary schools and some of this year has also been rehabilitated. By empowering the existing system in 2012, the remaining rehabilitation of 131,526 rooms consisting of 92,598 Elementary School and 38,928 Junior Secondary Schools will be implemented through APBN.*

**Keywords:** *classroom rehabilitation, 9 years compulsory education*

## A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia sebagai sub sistem dari pembangunan nasional dituntut kesiapannya untuk mampu menghadapi tantangan dan berbagai persoalan sebagai akibat adanya arus globalisasi. Menurut Hartato (2008:2), permasalahan pokok pendidikan di Indonesia meliputi empat hal yaitu permasalahan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, yang pada ujungnya nanti adalah peningkatan prestasi belajar siswa.

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan demikian secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa di Bahasa Inggris dan Matematika.

Demikian halnya bagi guru akan terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Sedangkan sekolah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan sekolah, selain berkewajiban menyediakan fasilitas, sekolah juga wajib menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki.

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Bangunan sekolah yang rusak dapat mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya karena secara psikologis anak tidak nyaman belajar pada bangunan yang hampir roboh (Setyorini, 2009). Keterbatasan fasilitas sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja. Tetapi pada daerah yang berdekatan dengan kota besar. Contohnya tidak adanya media yang digunakan dalam sarana pembelajaran seperti LCD, laptop, DVD, dan lain sebagainya. Lebih-lebih pada daerah terpencil, peserta didik tidak mampu membeli buku paket sebagai sumber dan acuan belajarnya. Apalagi media teknologi yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran. "Terbatasnya fasilitas untuk pembelajaran baik bagi pengajar dan yang belajar ... terkait terbatasnya dana pendidikan yg disediakan pemerintah" (Nelson Tansu, 2006). Oleh karena itu kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Peningkatan dana pendidikan sangat diperlukan guna terciptanya pendidikan yang sehat. Keterbatasan fasilitas sekolah seperti bangunan sekolah dan ruang kelas yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai akan bisa teratasi bila ada peningkatan anggaran dana dari pemerintah. Pendidikan akan membaik bila adanya guru yang berbobot dan dana yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peningkatan dana pendidikan di Indonesia.

Secara filosofis, dalam hal penyediaan sarana prasarana pendidikan di sekolah harus memenuhi syarat pedagogis baik dari aspek jumlah, jenis, dan kemutakhirannya. Sarana prasarana yang dimaksud meliputi: tanah, gedung, ruang kelas, laboratorium, kantin, auditorium, sarana olahraga, pusat belajar dan riset guru, unit kesehatan, toilet, tempat ibadah, dan tempat bermain yang relevan.

Secara yuridis, Pemerintah mengatur tentang sarana prasarana pendidikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. *Pertama*, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IX Pasal 35 memuat tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lalu diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara

nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan pemerintah ini mensyaratkan untuk diatur lagi dan telah diatur di dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang: Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Selanjutnya dalam Permendiknas No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat a (2) diatur tentang : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Thun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ini, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen aset sarana-prasarana sekolah, karena sarana dan prasarana adalah termasuk aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Kedua, terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, mengenai sarana prasarana pendidikan telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk secara periodik mendata dan melakukan pemutakhiran (up-dating) data sarana prasarana yang merupakan barang milik daerah, dan akan menjadi obyek pemeriksaan dari auditor keuangan daerah.

Ketiga, adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Semua kebijakan terkait menuntut pemangku kepentingan untuk bertindak adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana-prasarana sekolah tetap harus terus-menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi standar, karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar.

Dalam realitas di lapangan, khususnya di tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ternyata kemampuan masing-masing sekolah

dalam melengkapi sarana prasarana sangat beragam. Bagi sekolah-sekolah favorit tidak ada kendala yang berarti dalam melengkapi sarana prasarana yang sebaliknya untuk sekolah-sekolah yang kekurangan dukungan sarana prasarana menjadikan guru harus bekerja ekstra keras. Kesenjangan yang mencolok dalam melengkapi sarana prasarana pastinya juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerja guru. Kalau sarana prasarana minim, maka semangat peserta didik bisa melemah dan prestasi kian menjauh. Terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan di kota-kota besar dengan lembaga pendidikan di pedesaan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Lembaga pendidikan di pedesaan memiliki sarana dan fasilitas minim: gedung tidak representatif, tidak memiliki ruang kelas dan laboratorium yang memadai, tempat praktik, tempat olah raga, dan lain sebagainya. Begitu pula halnya dengan rehabilitasi ruang kelas belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya keterbatasan dana yang dimiliki sekolah sebagai dana pendamping, keterlambatan turunnya DAK dari pemerintah pusat, kurang adanya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan sekolah yang memerlukan bantuan, kurang adanya partisipasi baik dari masyarakat maupun komite sekolah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tersebut baik dalam hal monitoring maupun pengawasannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, pemerintah mengawali suatu program besar yang dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat melalui misi Kementerian Pendidikan Nasional RPJMN 2010-2014 yaitu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan (5K). Untuk menjamin 5K tersebut, maka Kemendiknas (sekarang Kemendikbud) telah melakukan reformasi internal yang meliputi penguatan organisasi, penguatan SDM, dan pembenahan tata laksana. Reformasi internal tersebut diharapkan mampu mendorong terjadinya reformasi layanan pendidikan sehingga misi Kemdikbud dapat dicapai.

Salah satu tugas Kemdikbud sesuai dengan renstra dan permasalahan sarana prasarana tersebut adalah dengan menjamin akses layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui Rehabilitasi Ruang Kelas dalam upaya mendukung Wajib 9 tahun (Kemdiknas, 2011;155).

Selama ini rehabilitasi ruang kelas bagi wajib 9 tahun dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan melalui ABPN dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota. Dengan sistem ini Kementerian Pendidikan Nasional terkendala dalam hal perencanaan untuk mengidentifikasi satuan pendidikan yang prioritas, sehingga antara daerah kriteria kerusakan menjadi berbeda-beda. Kelemahan lainnya adalah dalam hal monitoring dan evaluasi dimana terjadi kesulitan dalam penganggaran dan dalam pelaksanaannya kurang mendapat respon dari kabupaten/kota. Pendanaan rehabilitasi ruang kelas lainnya dilakukan melalui Bansos Ditjen Dikdas seperti Bansos Rehabilitasi Ruang Kelas di Daerah Bencana dan Tertinggal. Kendala program ini

adalah tidak sistemik yaitu terbatas pada daerah bencana dan daerah tertinggal, sementara kerusakan ruang kelas dapat terjadi dimana saja. Disamping itu rehabilitasi dilakukan melalui program bantuan luar negeri seperti Basic Education Program (BEP) yang memberikan bantuan bagi penguatan manajemen pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah rehabilitasi ruang kelas berbasis partisipasi masyarakat. Jumlah rehab yang dilakukan jumlahnya sangat terbatas sesuai komitmen lembaga pemberi bantuan.

Berdasarkan data di lapangan, sistem rehabilitasi yang ada saat ini jumlah ruang kelas yang masih mengalami rusak berat yang berdasarkan data awal tahun 2011 sebanyak 153.026 ruang, yaitu 110.598 Sekolah Dasar dan 42.428 Sekolah Menengah Pertama dan sebagian pada tahun ini juga sudah dilaksanakan rehabilitasi. Dengan tetap memberdayakan sistem yang sudah ada pada tahun 2012 rehabilitasi sisanya yang sebanyak 131.526 ruang terdiri dari 92.598 Sekolah Dasar dan 38.928 Sekolah Menengah Pertama akan dilaksanakan melalui APBN (Kemdiknas, 2011). Dengan data tersebut, perlu adanya sebuah upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan dasar 9 tahun.

## B. Pentingnya Rehabilitasi Ruang Kelas Dalam Pembelajaran

Permasalahan optimalisasi ruang kelas tersebut di atas apabila dikaitkan dengan manajemen sarana prasarana merupakan fungsi perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah (fungsi pelaksanaan). Pemeliharaan sarana prasarana sekolah dalam hal ini ruang kelas, merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola sarana prasarana sekolah. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus (Permendiknas 24/2007). Ruang kelas yang tidak terpelihara atau dirawat dengan baik lama kelamaan akan mengalami kerusakan baik sifatnya ringan, sedang maupun berat. Kerusakan ini akan mengakibatkan kenyamanan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi terganggu.

Kerusakan bangunan/ruang kelas adalah tidak berfungsinya bangunan/ruang kelas atau komponen bangunan/ruang kelas akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, beban fungsi yang berlebih, akibat ulah manusia, akibat pengaruh fisis/kimiawi/serangga atau perilaku alam seperti (gempa bumi/pergeseran atau penurunan tanah/sebab lain yang sejenis). Intensitas kerusakan bangunan/ruang kelas dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

1. Kerusakan Ringan:
  - a. Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
  - b. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

2. Kerusakan Sedang:

- a. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
- b. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

3. Kerusakan Berat:

- a. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- b. Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Kerusakan-kerusakan ini dinilai dapat membahayakan pengguna bangunan yang dalam hal ini adalah guru dan peserta didik, selain secara psikologis dapat mengurangi efektifitas pembelajaran dan minat belajar pada anak. Namun karena bangunan tersebut secara fungsional masih dapat digunakan, maka gedung-gedung sekolah beserta ruang kelas yang mengalami kerusakan tersebut perlu direhabilitasi.

Rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang difokuskan dalam upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Perencanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat bagi sekolah penerima program, dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan komponen bangunan yang mengalami kerusakan pada masing-masing sekolah (Permendikbud No 56 tahun 2011).

Program rehabilitasi yang dicanangkan pemerintah sekarang ini adalah program pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang berarti pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh sebab itulah di setiap sekolah perlu membentuk komite sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, guru dan orang tua murid bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam program rehabilitasi sekolah dalam hal ini ruang kelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyelesaian sampai pada pemeliharaan terhadap gedung atau ruang kelas yang telah direhabilitasi tersebut.

### C. Rehabilitasi Ruang Kelas Sebagai Bagian Dari Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Apabila ditinjau dari ukuran waktu pemeliharaan dapat dilakukan setiap hari (disebut pemeliharaan sehari-hari) dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu (disebut dengan pemeliharaan secara berkala) (Ary H Gunawan, 1983:32). Pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah

hususnya sarana prasarana yang kondisinya agak parah/berat biasanya memerlukan biaya yang lebih besar dan penanganan yang lebih serius agar sarana prasarana tersebut dapat dipertahankan agak lebih lama dalam pemakaiannya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeliharaan yang sering disebut dengan rehabilitasi. Dalam pemeliharaan memang telah dilakukan juga perbaikan-perbaikan kecil yang pada umumnya masih terjangkau oleh kemampuan para pemakainya, tetapi dalam kegiatan rehabilitasi seringkali harus mendatangkan/melibatkan tenaga-tenaga khusus dalam perbaikan besar tersebut bahkan mungkin dalam jumlah yang besar juga. Dalam rehabilitasi sering diperlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pekerjaan rehabilitasi tersebut perlu diprogramkan sekitar 6 bulan sampai satu tahun sekali, mengingat anggaran yang tersedia serta skala prioritasnya.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi bangunan adalah memperbaiki keadaan gedung yang mengalami kerusakan, dengan memungkinkan terjadinya perubahan bentuk yang lebih sesuai pada bangunan tersebut untuk mendapatkan bentuk dan fungsi bangunan yang lebih maksimal. Berbeda dengan renovasi gedung yang melakukan perbaikan namun tetap dalam bentuk bangunan yang sama. Jika dinding, kolom, atap, atau bagian lain dari bangunan sekolah mengalami kerusakan yang parah, maka menjadi tidak ekonomis untuk melakukan rehabilitasi. Namun bila kondisi pondasi bangunan tersebut masih baik dapat dilakukan pembongkaran struktur bagian atas bangunan tersebut dan dibangun kembali diatas pondasi yang lama. Namun bagaimanapun juga akan lebih baik bila meminta pendapat ahli bangunan sebelum menentukan tindakan yang akan diambil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi ruang kelas merupakan salah satu bagian rehabilitasi bangunan sekolah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan perbaikan agak berat sampai berat, penambahan, dan tambal sulam.

Rehabilitasi ruang kelas rusak berat mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004, dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2006.

Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian minimum 20 tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Acuan pedoman pekerjaan dan pemakaian bahan
2. Komponen Bangunan

Pengguna utama ruang kelas dan perpustakaan adalah siswa sekolah dasar yang secara anatomis memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga ukuran perabot harus dibuat



sesuai dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu standar dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Standar perabot ruang kelas persyaratan perabot ruang kelas harus memenuhi Standarisasi Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi:

- a. Kualitas
- b. Keamanan penggunaan
- c. Kenyamanan dalam penggunaan
- d. Kemudahan dalam pemakaian
- e. Kemudahan dalam pemeliharaan
- f. Kemudahan dalam perbaikan

#### D. Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas

Ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/pembangunan ruang kelas harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan baik dalam bentuk gambar bestek maupun spesifikasi teknisnya. Adapun standar rehabilitasi ruang kelas adalah sebagai berikut.

1. Ukuran ruangan menyesuaikan dengan ukuran ruang kelas yang akan direhabilitasi.
2. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
3. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.

Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara *swakelola* sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Oleh karena itu, setiap sekolah membentuk komite sekolah sebagai upaya untuk mensukseskan program rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dengan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan

pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

Dana dari pemerintah dalam bentuk DAK biasanya prosesnya agak lama sehingga sambil menunggu turunnya dana, sekolah melakukan persiapan pelaksanaan rehabilitasi, antara lain:

1. Mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis secara lebih seksama dan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan;
2. Membuat papan informasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm.
  - b. Papan Informasi dipasang/ditempatkan disekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak terkena/tertimpa air hujan,serta tidak rusak selama pelaksanaan.

Papan Informasi tersebut paling tidak memuat hal-hal sbb:

- 1) Lokasi pembangunan pada peta *site plan* sekolah,
  - 2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana,
  - 3) Informasi tentang progres pelaksanaan rehabilitasi,
  - 4) Bagan organisasi Panitia dilengkapi dengan nama-nama anggotanya,
  - 5) Gambar kerja dan rencana biayanya,
  - 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja.
3. Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas, mandor, tukang dan pekerja.
  4. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan

Menurut Permendiknas no 24 tahun 2007, dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan rehabilitasi tersebut harus disediakan oleh sekolah dan tidak boleh dibebankan kepada DAK yang diterima oleh sekolah. Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai setelah DAK dari pemerintah diterima oleh sekolah.

Menurut penulis, kebijakan tersebut tidaklah tepat karena kondisi keuangan masing-masing sekolah yang berbeda-beda. Bagi sekolah yang kondisinya baik dalam artian berkecukupan maka tidak menjadi masalah untuk melakukan kegiatan persiapan tersebut. Lain halnya bagi sekolah-sekolah yang minim anggaran sekolah, maka hal tersebut menjadi beban tersendiri karena harus mengupayakan berlangsungnya kegiatan tersebut. Hal ini sebenarnya dapat ditangani sekolah dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar ataupun komite sekolah untuk pengadaan anggaran tersebut. Tentu saja sekolah perlu membuat sebuah paparan tentang penggunaan dana tersebut secara transparan untuk disosialisasikan pada seluruh masyarakat. Bahkan sekolah dapat mencari donatur ke perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan bangunan untuk memperoleh dukungan dana tersebut.

Dalam hal pendanaan untuk rehabilitasi ruang kelas, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan atau perbandingan agar optimal dalam pelaksanaannya. Pertama, berdasarkan hasil penelitian di California yang dilakukan oleh pemerintah tentang "Fasilitas Sekolah: Membangun Peran Negara/Pemerintah. (Anonymous. Badan Legislatif Negara. (Mar 1998), menyimpulkan bahwa peran negara melalui kabupaten menyediakan dana bagi sekolah di wilayahnya untuk rehabilitasi ruang kelas/konstruksi gedung baru yang dibutuhkan dan untuk pemeliharaan serta perawatan fasilitas sekolah yang ada. Sejumlah negara memanfaatkan dana pembangunan sekolah, dengan dana yang disediakan kabupaten dengan pinjaman berbunga rendah. Selain itu Negara juga menyediakan hibah yang biasanya diperuntukkan hanya bagi kabupaten yang paling membutuhkan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi negara-negara lain yang ingin membantu dengan pengeluaran modal tetapi dengan cara yang terbatas. Cara lain yang digunakan Negara untuk membantu pengeluaran modal antara lain :

- a. Pendanaan fasilitas melalui program dukungan dasar dari wali murid atau dengan penetapan formula keuangan sekolah. Setiap murid diminta menyumbangkan sejumlah uang yang ditetapkan/ ditentukan dengan rumus tertentu yang diformulasikan sekolah.
- b. Menerbitkan obligasi untuk membayar pembangunan sekolah, kemudian menyewakan fasilitas untuk kabupaten dengan tingkat bunga paling rendah. (di California itu adalah \$ 1 per tahun selama 40 tahun.)
- c. Pemberian persentase pemerataan berdasarkan kekayaan kabupaten. Menyediakan hibah datar. Indiana menyediakan \$ 40 per murid, dan kabupaten dapat mengajukan permohonan untuk pinjaman berbunga rendah melalui Dana Umum Sekolah.
- d. Pemberian dana penuh. Di Hawaii, semua proyek modal harus disetujui oleh Legislatif dan didanai sepenuhnya oleh penerimaan pajak negara.
- e. Memasuki perjanjian sewa beli dengan setiap daerah.
- f. Menjual sejumlah obligasi kewajiban umum dan mengalokasikan persentase dari hasil undian untuk membayar bunga utang.
- g. Menilai biaya dampak pada pengembang kota untuk menutupi efek subdivisi baru pada distrik sekolah lain.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, penulis merasa setuju karena dana untuk rehabilitasi ruang kelas dan perawatan serta pemeliharaan fasilitas memang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara melalui kabupaten/kota sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait adanya otonomi daerah. Ada satu point yaitu point yang pertama, yang harus memformulasikan keuangan sekolah dengan menarik biaya dari siswa dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Penulis tidak setuju dengan

pernyataan tersebut, karena hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia yang biasanya kemampuannya berada dalam kategori menengah ke bawah. Di Indonesia, pendidikan di SD dan SMP merupakan program wajib belajar, sehingga pemerintah sebagian besar menanggung biaya pendidikan.

Kedua, hasil penelitian tentang Jenis Sekolah, Fasilitas dan Kinerja Akademik Mahasiswa di Sekolah Menengah di Ondo State, Nigeria yang dilakukan oleh Alimi, Olatunji Sabitu, Ehinola, Gabriel Babatunde, Alabi, Festus Oluwole. *International Education Studi* 5. 3 (Jun 2012): 44-48. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pentingnya fasilitas fisik tidak dapat digantikan. Fasilitas seperti laboratorium modern, perpustakaan dan ruang kelas harus ada di semua sekolah. Hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat sumber daya yang tersedia memang sangat penting bagi para guru untuk menunjukkan tingkat kecerdasan dan komitmen guru terhadap penyampaian materi pelajaran secara efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk renovasi bangunan tua, kursi, meja, lemari dan akuisisi ruang kelas yang modern seperti yang sebelumnya direkomendasikan oleh Alimi (2007). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi fasilitas sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap kinerja akademik dalam sistem sekolah. Dalam hal ini termasuk antara lain furniture (perabot) kelas, peralatan untuk pembelajaran dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penulis merasa setuju karena salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya pemahaman dan prestasi belajar peserta didik adalah kenyamanan dan keamanan di ruang kelas sebagai tempat berlangsung proses belajar mengajar. Oleh karena itu, apabila gedung/ruang kelas yang sudah tua atau usang yang dapat membahayakan pengguna, hendaknya segera direhabilitasi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun dalam kenyataan di lapangan yang selama ini penulis amati, diketahui bahwa upaya pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena:

1. adanya keterbatasan APBN dan DAK dari pemerintah untuk rehabilitasi ruang kelas untuk sekolah-sekolah yang sudah diidentifikasi kerusakannya,
2. dalam melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dengan menggunakan DAK ini belum dilakukan secara transparan dan akuntabel,
3. kurang adanya pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan program rehabilitasi,
4. belum adanya peran aktif komite sekolah dalam pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas,
5. adanya keterbatasan sekolah dalam menyiapkan dana pendamping untuk rehabilitasi ruang kelas sehingga semua tergantung dana dari pemerintah,

6. masih kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih untuk melaksanakan kegiatan yang belum ditangani melalui anggaran dari pemerintah pusat.

Mengingat belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas yang ada, sementara itu ruang belajar yang akan direhabilitasi juga sedang digunakan untuk proses belajar mengajar, maka dengan sendiri proses belajar mengajar menjadi terganggu. Banyak siswa yang tidak dapat berkonsentrasi menerima materi pelajaran yang sedang disampaikan para guru. Dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi hasil preatasi belajar siswa.

Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi program dan kegiatan rehabilitasi sarana pendidikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan dukungan baik yang berupa bantuan tenaga, pikiran, maupun financial demi kelancaran kegiatan tersebut. Sekolah perlu menjalin kerjasama denga pihak swasta untuk mendapat bantuan keuangan untuk mendampingi DAK dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan persiapan sebelum DAK turun.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang menjadi penyebab adanya pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas yang belum optimal, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Terkait dengan keterbatasan APBN dan DAK sebenarnya dapat mengupayakan dana dari sumber lain yang dapat digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, misalnya dana hibah ataupun bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dari pemerintah daerah setempat.
2. Terkait adanya penggunaan DAK yang belum akuntabel dan transparan bisa diupayakan melalui pemberdayaan komite sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAK dan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak akan ada lagi penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan DAK yang memang dikhususkan hanya untuk rehabilitasi ruang kelas.
3. Sekolah perlu memberdayakan masyarakat sekitar untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas terutama mereka yang memiliki kemampuan professional yang memadai baik secara teknis sebagai tenaga lapangan maupun sebagai perancang bentuk atau tipe ruang kelas yang memenuhi standar bangunan pendidikan yang ideal.
4. Sekolah perlu menggalakkan peran aktif komite sekolah baik melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir kegiatan tersebut.

5. Terkait dengan dana pendamping, sekolah dapat mengupayakan melalui jalinan kerjasama dengan pihak swasta yang benar-benar peduli dengan kemajuan dan pengembangan pendidikan di daerahnya.
6. Pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dengan cara merencanakan anggaran khusus untuk sekolah-sekolah yang telah diidentifikasi memerlukan dana tambahan.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas akan berjalan dengan optimal, sehingga dengan secepatnya dapat memenuhi kebutuhan ruang kelas di pendidikan dasar untuk kelancaran proses belajar mengajar. Akan tetapi dalam realisasinya, penulis menyadari bahwa memang tidak semua upaya dapat dilakukan karena banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, misalnya kurang adanya kesadaran berbagai pihak yang terlibat dalam upaya rehabilitasi ruang kelas. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kesadaran dari semua pihak untuk mensukseskan program rehabilitasi ruang kelas tersebut.

#### E. Penutup

Pemenuhan sarana pendidikan dalam hal ini ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB/SMP. Upaya pemerintah melalui program penuntasan rehabilitasi ruang belajar SD/SDLB/SMP dengan prioritas rusak berat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, jumlah ruang kelas yang direhabilitasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jumlah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah yaitu DAK sangat terbatas, sehingga belum semua sekolah yang sudah dipetakan untuk direhabilitasi belum mendapat penanganan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas maka pihak dinas pendidikan kabupaten/kota dapat mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sehingga proses rehabilitasi ini tidak mengganggu proses belajar mengajar sekolah. Sedangkan pihak sekolah hendaknya dapat melaksanakan program dan kegiatan ini secara transparan dan akuntabel, dengan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Untuk mengatasi kurangnya dana, sekolah sebaiknya tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah melainkan bekerjasama dengan pihak swasta. Keterlibatan semua pihak/stakeholder pendidikan terutama komite sekolah sangat diharapkan agar dapat membantu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal.

## Daftar Pustaka

- Alimi, Olatunji Sabitu, Ehinola, Gabriel Babatunde, Alabi, Festus Oluwole *Jenis Sekolah, Fasilitas dan Kinerja Akademik Mahasiswa di Sekolah Menengah di Ondo State, Nigeria*. International Education Studi 5. 3 (Jun 2012): 44-48
- Direktorat tenaga kependidikan. (2007). *Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Persekolah Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dittendik.
- Direktorat tenaga kependidikan direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan departemen pendidikan nasional. Decentralized basic education (dbe-1) ± usaid. 2007. *Pengertian dan acuan manajemen aset sarana prasarana sekolah (buku iv)*. Jakarta : Decentralized basic education
- Direktorat tenaga kependidikan direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan departemen pendidikan nasional. Decentralized basic education (dbe-1) ± usaid. 2010. *Panduan Ringkas: Manajemen Aset Sarana-Prasarana Sekolah untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan (Buku I)*. Jakarta: Decentralized Basic Education (Dbe-1) – Usaid
- Hartato. (2008). Permasalahan Pendidikan. <http://fatamorgana.wordpress.com/2008/07/22/bab-vii-permasalahan-pendidikan/>
- Ibrahim Bafadal. (2004). *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi* Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa*
- Wahyuningrum. (2000). *Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Yogyakarta: UNY